

Laporan Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023
s/d Bulan Maret
BIRO TATA PEMERINTAHAN

Anggaran masih level Sub Kegiatan, belum output tertentu yang mendukung.

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan			Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)						
1	2.10.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIHWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN	312.648.500	21,10	21,10	0,00	62.601.700	20,02	52.623.952	16,83	3,19				
1.1	2.10.11.5.01	Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	21,10	21,10	0,00	62.601.700	20,02	52.623.952	16,83	3,19				
1.1.1	2.10.11.5.01.01	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	312.648.500	21,10	21,10	0,00	62.601.700	20,02	52.623.952	16,83	3,19	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum		<p>1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan, Kepentingan Masyarakat, dan Kesejahteraan Masyarakat : 0,25 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>2. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY : 1 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>3. Penyusunan peta batas daerah pada kawasan strategis</p> <p>4. Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>5. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen</p> <p>6. Laporan Sinkronisasi garis batas daerah perbatasan DIY dengan Jawa Tengah pada segmen batas daerah kab. Kulon Progo dengan Kab. Magelang : Dokumen dari 1 Dokumen</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>A. Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY : 1. Terlaksananya rapat koordinasi internal; 2. Tersampainya surat permohonan data wilayah administrasi kepada Kabupaten/Kota berdasarkan surat Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Nomor 125 / 00181;. 3. Penyusunan data wilayah tahun 2023 4. Telah dicetak buku Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di DIY tahun 2023</p> <p>B. Laporan pembinaan serta pengawasan penetapan dan penegasan batas kalurahan/kecamatan: 1. Terlaksananya rapat koordinasi dalam rangka percepatan penegasan batas kalurahan/kecamatan di DIY; 2. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan BIG dalam rangka percepatan pelaksanaan penegasan dan penetapan batas kalurahan/kecamatan; 3. Terlaksananya Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas Kalurahan/Keurahan di DIY selama 2 (dua) hari pada tanggal 27 - 28 Februari 2023 dengan Narasumber Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dihadiri peserta dari OPD Tim Teknis Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota se DIY dan perwakilan lurah se DIY</p> <p>C. Laporan Pembahasan Revisi Permendagri Batas Daerah DIY dengan Jawa Tengah : 1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan sinkronisasi batas daerah Kab. Gunungkidul - Kab. Wonorejo pada subsektor Kal. Songayma - Desa Paranggipito</p> <p>Faktor Penghambat: -Isik, ada hambatan yang berarti</p> <p>Faktor Pendukung: -Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan OPD Tim penegasan batas Daerah/Desa di DIY -efisiensi pada perajdin sebesar Rp. 1.390.974, belanja bahan komputer Rp. 189.200, ATK 180.934, kertas cover Rp. 117.040, honor narasum Rp. 800.000, transport peserta Rp. 1.080.000, akomodasi narasum Rp. 3.969.600</p>
2	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	220.334.000	43,71	43,71	0,00	95.820.400	43,49	94.220.300	42,76	0,73				
2.1	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	24.464.000	34,66	34,66	0,00	8.476.600	34,65	8.476.600	34,65	0,00				
2.1.1	2.12.02.1.01.02	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	24.464.000	34,66	34,66	0,00	8.476.600	34,65	8.476.600	34,65	0,00	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	DIY	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jumlah Dokumen Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi : 1 Dokumen dari 50 Dokumen</p> <p>2. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (KK, KIA, KTP-E, Akta Kelahiran) : 7 dokumen dari 49 dokumen</p> <p>3. Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen : dokumen dari 1 dokumen</p>	<p>Faktor Penghambat: - Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahamnya masyarakat mengenai prosedur dokumen administrasi kependudukan. - Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang mengurus administrasi kependudukan di desa-desa sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukannya. - Telah dilakukan jemput bola pelayanan administrasi namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukannya.</p> <p>Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY - terdapat layanan jemput bola yang dilakukan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sehingga dapat mempermudah layanan administrasi kepada panti dan LKSA</p>
2.2	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	195.870.000	44,84	44,84	0,00	87.343.800	44,59	85.743.700	43,78	0,81				
2.2.1	2.12.02.1.02.01	Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	19.220.000	31,40	31,40	0,00	5.855.000	30,46	5.375.000	27,97	2,49	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran penduduk tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi terkait fasilitas pendaftaran penduduk pada bulan Januari 2023; 3. Terlaksananya rapat kerja pendaftaran warga negara asing di wilayah NKRI secara daring dengan peserta dari penasehat hukum yang memiliki pegawai WNA dan narasumber dari Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2023; 4. Terlaksananya kegiatan coffee morning terkait pendaftaran WNA di DIY bersama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se DIY dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 14 Maret 2023;</p> <p>Faktor Penghambat: - efisiensi uang transport peserta kerja warga negara asing pada bulan Februari 2023 sebanyak Rp 480.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan</p> <p>2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Rapat Kerja Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk : 1 Laporan dari 1 Laporan</p>
2.2.2	2.12.02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	176.650.000	46,30	46,30	0,00	81.488.800	46,13	80.368.700	45,50	0,63	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pendaftaran Penduduk	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>1. Tersusunnya jadwal kegiatan sosialisasi terkait administrasi kependudukan tahun 2023; 2. Terlaksananya rapat koordinasi persiapan sosialisasi pada bulan Februari 2023 dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota, Kaparewon/Kemantren, Kalurahan/Keurahan yang akan digunakan untuk kegiatan sosialisasi; 3. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 14 Februari 2023 dengan peserta dari TP PKK di beberapa Kaparewon dan Perwakilan ISI di DIY; 4. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Februari 2023 di Kalurahan Gwangsan; 5. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Februari 2023 di Kalurahan Sunyatmajan; 6. Terpublikasinya kegiatan Sosialisasi Permendagri 73 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 7. Terpublikasinya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA yang dilakukan di Kalurahan Gwangsan dan Sunyatmajan pada tanggal 20 Februari 2023 melalui surat kabar Tribun Jogja; 8. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 2 Maret 2023 di Kaparewon Gentojo; 9. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 3 Maret 2023 di Kalurahan Gaturtunggal, Kaparewon Depok, Sleman; 10. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 9 Maret 2023 di Kalurahan Bendungan, Kaparewon Wates, Kulon Progo; 11. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 16 Maret 2023 di Kalurahan Tridadi, Kaparewon Sleman, Sleman; 12. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan KIA pada tanggal 17 Maret 2023 di Kaparewon Gamping, Sleman;</p> <p>Faktor Penghambat: - efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 85.200 - efisiensi belanja kertas dan cover sebesar Rp 14.700 - efisiensi belanja baterai sebesar Rp 20.200 - efisiensi honor narasumber karena ketidaksihwalan DPRD sebagai narasumber pada kegiatan Sosialisasi Adminduk di Kalurahan Bendungan, Wates, Kulon Progo 9 Maret 2023 sebesar Rp 1.000.000,-</p> <p>Faktor Pendukung: - terjalin koordinasi yang baik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se-DIY</p>	

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
3	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	72.142.900	43,67	43,67	0,00	31.464.900	43,61	31.626.500	43,84	-0,23					
3.1	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	41.622.200	69,50	69,50	0,00	28.891.300	69,41	28.593.000	68,70	0,71					
3.1.1	2.12.03.1.01.04	Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	41.622.200	69,50	69,50	0,00	28.891.300	69,41	28.593.000	68,70	0,71	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pelayanan Terpadu Fasilitas Dokumen Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dari 1 Laporan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas pelayanan bidang pencatatan sipil di Kab/Kota tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi internal terkait kegiatan fasilitas pelayanan bidang pencatatan sipil tahun 2023; Terlaksananya pengadaan peralatan penunjang pelayanan terpadu (cleaning kit, film, ribbon) pada bulan Maret 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahalannya masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan. Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukan. efisiensi belanja pengadaan alat penunjang pelayanan terpadu (cleaning kit, film, ribbon) sebesar Rp 298.300 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara Biro Tapem DIY dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota untuk melakukan pelayanan jemput bola penekanan KTP-el di sekolah dan pendafaran Identitas Kependudukan Digital
3.2	2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	30.520.700	8,44	8,44	0,00	2.573.600	8,43	3.033.500	9,94	-1,51					
3.2.1	2.12.03.1.02.01	Facilitasi terkait Pencatatan Sipil	26.104.500	2,20	2,20	0,00	573.600	2,20	533.500	2,04	0,16	DIY	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Pelayanan Fasilitas Isbat Nikah : 1 Laporan dari 1 Laporan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pencatatan sipil tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitas terkait pencatatan sipil tahun 2023; Terdistribusikannya surat terkait permohonan pendataan potensi isbat nikah di Kabupaten/Kota pada bulan Maret 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran, ketidaktahuan dan belum pahalannya masyarakat terkait kepengurusan dokumen administrasi kependudukan. Topografi wilayah Gunungkidul membuat instansi yang berkaitan dengan adminduk jaraknya cukup jauh sehingga masyarakat menunda untuk melaporkan peristiwa kependudukan. Telah dilakukan jemput bola pelayanan adminduk namun masih ada masyarakat yang menunda pelaporan peristiwa kependudukan. efisiensi belanja ATK bulan Januari sebesar Rp 40.100 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Dinas Dukcapil Kab/Kota
3.2.2	2.12.03.1.02.04	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	4.416.200	45,30	45,30	0,00	2.000.000	45,29	2.500.000	56,61	-11,32	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pencatatan Sipil	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemberian Insentif Bagi Anak Pemilik KIA di Wilayah DIY : 1 Dokumen dari 3 Dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan koordinasi berkala antar lembaga pemerintah dan non pemerintah kewenangan provinsi terkait pencatatan sipil tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan kerja sama pemberian insentif bagi pemegang KIA tahun 2023; Terlaksananya kegiatan rapat kerja sama pemanfaatan Kartu identitas anak di DIY pada tanggal 1 Maret 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> tidak ada hambatan berarti yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi yang baik antara mitra kerja sama / stakeholder yang memberikan insentif bagi pemegang KIA di DIY
4	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUKUKAN	67.573.800	5,26	5,26	0,00	2.732.100	4,04	2.430.871	3,60	0,44					
4.1	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	67.573.800	5,26	5,26	0,00	2.732.100	4,04	2.430.871	3,60	0,44					
4.1.1	2.12.04.1.02.01	Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	32.331.100	11,00	11,00	0,00	2.732.100	8,45	2.430.871	7,52	0,93	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan dan Perawatan Operasional SIAK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan fasilitas terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan fasilitas terkait SIAK tahun 2023; Telah tersedianya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Februari - Maret 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> efisiensi belanja ATK bulan Januari sebanyak Rp 139.100 efisiensi belanja kertas dan cover Rp 6.000 efisiensi belanja internet bulan Januari Rp 52.043 efisiensi belanja internet bulan Februari Rp 52.043 efisiensi belanja internet bulan Maret Rp 52.043 <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022
4.1.2	2.12.04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	35.242.700	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan : 1 Dokumen dari 4 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan : 1 Dokumen dari 2 Dokumen 3. Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Rapat Kerja Terkait Remisi : 0 Dokumen dari 2 Dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan tahun 2023; Penyandingan data kependudukan dari Dinas Sosial DIY terkait verifikasi data penerima bantuan sosial khusus yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> belum ada anggaran kas keuangan pada triwulan 1 karena penganggaran dimulai pada bulan April 2023 namun persiapan dan kegiatan telah dilakukan tanpa dukungan anggaran. Terbatasnya akses database kependudukan akibat penerapan SIAK terasli, saat ini database kependudukan dikelola sepenuhnya oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Instansi/OPD dapat melakukan pemanfaatan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil
5	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUKUKAN	41.126.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
5.1	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan	41.126.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
5.1.1	2.12.05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	41.126.000	1,00	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	Daerah Istimewa Yogyakarta	Bagian Bina Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Subbagian Bina Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1. Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Profil Data dan Proyeksi Kependudukan DIY Tahun 2022 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersusunnya jadwal kegiatan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan tahun 2023; Terlaksananya rapat koordinasi internal persiapan kegiatan penyusunan profil data kependudukan tahun 2023; Terdistribusikannya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada bulan Februari - Maret 2023; <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> kegiatan persiapan pada triwulan 1 dapat dilaksanakan tanpa dukungan anggaran, anggaran kegiatan ditangguhkan mulai bulan Juli 2023 untuk pengadaaan jasa konsultasi penyusunan profil <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya data konsolidasi bersih (DKB) dari Ditjen Dukcapil Kemendagri Semester II Tahun 2022
6	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	50.000.000	4,36	4,36	0,00	1.454.300	2,91	1.444.200	2,89	0,02					
6.1	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	50.000.000	4,36	4,36	0,00	1.454.300	2,91	1.444.200	2,89	0,02					
6.1.1	2.13.04.1.01.02	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.306.800	3,00	3,00	0,00	318.900	2,08	316.000	2,06	0,02	Daerah Istimewa Yogyakarta	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan/Kelurahan dan Kapanevor/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa : 1 Dokumen dari 1 Dokumen		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa" Koordinasi dalam upaya pembinaan dalam manajemen pemerintahan desa dalam upaya penyelesaian permasalahan Dukuh pada tanggal 2 Pdtrian. <p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tidak ada hambatan yang berarti <p>Faktor Pendukung:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kesediaan Nelayaka selaku Paguyuban Lurah dan Pamong Provinsi untuk hadir memberikan arahan
6.1.2	2.13.04.1.01.04	Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan	18.088.400	4,00	4,00	0,00	435.600	2,41	432.400	2,39	0,02	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan		1. Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan		<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Facilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa *Facilitat pembinaan dengan Kelurahan Selomartani,

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
		Pengawasan Pembangunan Desa												Kalurahan/Kelurahan dan Kapaneow/Kemantren	Pembangunan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	selaku penerima BKK papan penanda keistimewaan dokumen pelaksanaan pembangunan papan penanda keistimewaan - Fasilitas Koordinasi dengan Perwakilan Lurah Kulon Progo, Bantul, Sleman dan Gunungkidul terkait upaya optimalisasi APBD desa melalui rancangan rencana pelaksanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPAL. Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - Kehadiran Perwakilan Lurah dari masing-masing Kabupaten se DIY
6.1.3	2.13.04.1.01.05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	16.604.800	6,00	6,00	0,00	699.800	4,21	695.800	4,19	0,02			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapaneow/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen 2. Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: *Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa* - Koordinasi pembinaan pengelolaan keuangan desa terhadap Kalurahan Selomartani dalam persiapan pengelolaan pertanggungjawaban APBDK BKK Penanda Keistimewaan - Rapat Koordinasi Fasilitas Keuangan Desa dengan Dinas PPKal Kabupaten Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - Kehadiran OPD Pembina DIY dan Kabupaten dalam pertemuan
7	2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	385.850.700	0,84	0,84	0,00	3.247.300	0,84	3.243.000	0,84	0,00					
7.1	2.22.08.5.01	Seluruh Bahasa, Sastra dan Permuseuman	133.725.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
7.1.1	2.22.08.5.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Kesajarah	133.725.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00		DIY	BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesajarah : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Naskah Akademik Penetapan Hari Jadi DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Draft Raperda tentang Penetapan Hari Jadi DIY : Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
7.2	2.22.08.5.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	252.125.700	1,29	1,29	0,00	3.247.300	1,29	3.243.000	1,29	0,00					
7.2.1	2.22.08.5.06.03	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	252.125.700	1,29	1,29	0,00	3.247.300	1,29	3.243.000	1,29	0,00			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapaneow/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesajarah : Dokumen dari 2 Dokumen 2. Naskah Akademik Penetapan Hari Jadi DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 3. Draft Raperda tentang Penetapan Hari Jadi DIY : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Pemasangan Quick Response System (QRS) Code : Kalurahan dari 302 Kalurahan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1) Papan Penanda Keistimewaan - Rapat koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan Selomartani, Kapaneow Kalsan, Kabupaten Sleman pada hari Senin, 16 Januari 2023 dengan hasil Kalurahan Selomartani perlu menjalankan beberapa hal berikut: a. Pengusulan proposal kegiatan pembangunan Papan Penanda Keistimewaan oleh Kalurahan Selomartani; b. Proses Pencairan anggaran oleh BPKA DIY; c. Pelaporan hasil pembangunan Papan Penanda Keistimewaan - Rapat Koordinasi terkait Penanda Keistimewaan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Paguyuban Semar Sembogo sejumlah 25 orang dengan pembahasan tindak lanjut penerapan kelembagaan kalurahan atas ketersediaan sarana prasarana di tingkat Padukuhan sebagai eritis terdekat dengan masyarakat. - Koordinasi pelaksanaan pembangunan papan penanda keistimewaan dilakukan untuk memonitor pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu dengan sasaran 301 kalurahan dengan hasil: a. Laporan pertanggungjawaban dengan koordinasi sebagai berikut: Biro Tapem ada 43 laporan belum masuk, BPKA ada 11, Paniradya ada 16, sehingga selisih data ada 27 kalurahan yang kemudian dikoordinasikan dengan komunikasi secara langsung dengan Kalurahan terkait. b. Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan Balai Padukuhan dihari 23 Kalurahan dari Gunungkidul pada tanggal 2 dan 6 Maret 2023 terkait koordinasi pemahaman teknis pelaksanaan pembangunan balai padukuhan. Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: - Keterbukaan informasi data dari BPKA dan Paniradya selaku TAPD penanggungjawab BKK Papan Penanda Keistimewaan - Penyampaian komunikasi dan tindak lanjut Pemerintah Kalurahan untuk mengoptimalkan penyelesaian laporan pertanggungjawaban BKK Kalurahan - Kesiapan Pemerintah Kalurahan Selomartani untuk menjalankan kegiatan Pembangunan Papan Penanda Keistimewaan - Kesiapan kehadiran Ketua Paguyuban Semar Sembogo dalam koordinasi
8	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	608.366.100	27,96	27,96	0,00	160.997.800	26,46	149.633.849	24,60	1,86					
8.1	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.719.900	49,13	49,13	0,00	9.839.800	45,30	8.030.800	36,97	8,33					
8.1.1	4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.247.200	49,25	49,25	0,00	5.146.800	45,76	3.547.300	31,54	14,22			BIRO TATA PEMERINTAHAN Setda DIY	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : 3 Dokumen dari 5 Dokumen 2. Rencana Strategis Biro Tapem Tahun 2022-2027 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Rencana Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2024 : Dokumen dari 1 Dokumen 4. Rencana Kinerja Perubahan Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : Dokumen dari 1 Dokumen 5. Tersumanya ROPK : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 6. Tersumanya Perjanjian Kinerja Biro Tata Pemerintahan Tahun 2023 : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renstra 2022-2027 2. Penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2022-2027 sesuai dengan RPJMD 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon II 4. Penyelesaian Perjanjian Kinerja Eselon II 5. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah dalam rangka penyempurnaan Renja 2024 6. Penyusunan Renja 2024 sesuai dengan Renstra 7. Revisi Dokumen Renstra 2022-2027 8. Penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2024 9. Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV Faktor Penghambat: Efisiensi honorarium Forum Perangkat Daerah dikarenakan PNS tidak bisa diberi honorarium, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Faktor Pendukung: 1. Koordinasi internal yang solid 2. Tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.1.2	4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.472.700	49,00	49,00	0,00	4.693.000	44,81	4.483.500	42,81	2,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapaneow/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan 2. Dokumen LKJ IP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan data terakut dokumen LKJIP 2. Pengumpulan data terakut dokumen LKJIP 3. Penyusunan LKJIP 4. Penyusunan LKJIP 5. Pencetakan LKJIP 6. Penyerahan LKJIP ke Biro Organisasi Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.
8.2	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.724.600	33,21	33,21	0,00	13.656.600	31,23	13.473.800	30,82	0,41					
8.2.1	4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31.560.000	26,25	26,25	0,00	7.890.000	25,00	7.890.000	25,00	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapaneow/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 2 Laporan dari 2 Laporan 2. Dokumen LKJ IP : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD : 1 Jenis dari 1 Jenis 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD : 0 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pengumpulan bahan 2. Pengecekan validitas berkas pertanggungjawaban keuangan seluruh program sampai dengan Bulan Maret 3. Pembayaran honorarium tim penatausahaan keuangan triwulan 1 tahun 2023 Faktor Penghambat: Pengumpulan dokumen mendekati akhir bulan tutup buku Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu.
8.2.2	4.01.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.644.400	78,00	78,00	0,00	3.594.400	77,39	3.528.000	75,96	1,43			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapaneow/Kemantren	1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Efisiensi honorarium dengan pejabat BMD biro, serta bendahara SKPD 2. Tersesainya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022 versi Unaudited 3. Pencetakan Laporan Keuangan Tahun 2022

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
														- Subbagian Tata Usaha	2. Laporan Keuangan Tahunan : 1 Laporan dari 1 Laporan	Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan berarti Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan laporan tepat waktu
8.2.3	4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	7.520.200	34,75	34,75	0,00	2.172.200	28,88	2.055.800	27,34	1,54			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 2 Laporan dari 4 Laporan 2. Laporan Keuangan Bulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan Keuangan Triwulanan : 1 Laporan dari 1 Laporan 4. Laporan Keuangan Semester : 0 Laporan dari 1 Laporan 5. Laporan Prognosis : 0 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pembuatan laporan keuangan Bulanan sampai dengan Bulan Maret Faktor Penghambat: Efisiensi harga alat tulis kantor di bawah standar DPA Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk menyelesaikan laporan tepat waktu
8.3	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	11.400.000	26,00	26,00	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00					
8.3.1	4.01.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.400.000	26,00	26,00	0,00	2.850.000	25,00	2.850.000	25,00	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan Aset SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Inventarisasi ulang kondisi BMD 2. Pembuatan kartu pemegang BMD 3. Pembayaran honorarium pengurus barang milik diersampai dengan triwulan 1 Faktor Penghambat: Banyak kondisi barang yang sudah mulai rusak tetapi tidak ditindak untuk penggantian Faktor Pendukung: Dedikasi pegawai untuk tetap menjalankan tugasnya secara efektif
8.4	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.171.900	26,40	26,40	0,00	93.684.200	25,80	90.602.649	24,95	0,85					
8.4.1	4.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.531.600	55,00	55,00	0,00	9.619.200	54,87	8.844.567	50,45	4,42			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Penyediaan peralatan listrik demi memperlancar kinerja 2. Pengaktifan kembali akun zoom biro untuk mendukung kelancaran kegiatan Faktor Penghambat: Kesulitan dalam proses pembelian peralatan listrik keseluruhan gedung Unit 2 2. Efisiensi harga satuan akun zoom di bawah DPA Faktor Pendukung: Kesiapan pegawai untuk menghadapi permasalahan dan mengambil solusi
8.4.2	4.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.203.400	28,50	28,50	0,00	8.722.400	27,09	8.434.000	26,19	0,90			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 1 Paket dari 2 Paket 2. Alat Tulis Kantor : 1 Paket dari 1 Paket 3. Tabung Pemadam Kebakaran : 0 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran kegiatan SKPD 2. Mengkomodir peralatan dan perlengkapan kantor Bulan Maret untuk mendukung kelancaran kegiatan Beberapa barang belum tersedia di mbizmarket.co.id Faktor Penghambat: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggungjawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.3	4.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.984.900	41,00	41,00	0,00	2.655.600	38,02	2.592.400	37,11	0,91			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan : 1 Paket dari 1 Paket 2. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan peralatan dan bahan pembersih SKPD 2. Mengkomodir peralatan rumah tangga Bulan Maret Faktor Penghambat: Beberapa barang belum tersedia di Mbizmarket.co.id Faktor Pendukung: 1. Kecepatan rekanan untuk merespon dan mengantarkan barang pesanan 2. Tanggung jawab pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
8.4.4	4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.489.000	29,75	29,75	0,00	5.937.000	27,63	5.910.600	27,51	0,12			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : 2 Paket dari 2 Paket 2. Barang cetakan : 1 Paket dari 1 Paket 3. Penggandaan : 1 Paket dari 1 Paket	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan SKPD 2. Mengkomodir barang cetakan dan penggandaan Bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan berarti Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama antar pegawai yang terjalin baik
8.4.5	4.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.160.000	26,00	26,00	0,00	2.790.000	25,00	2.790.000	25,00	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan : 2 Dokumen dari 2 Dokumen 2. Bahan bacaan Jawa Fost : 1 Dokumen dari 1 Dokumen 3. Bahan bacaan Kedaulatan Rakyat : 1. Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan bahan bacaan pada SKPD 2. Menyediakan bahan bacaan surat kabar harian untuk memberikan informasi yang cukup dalam rangka mendukung kinerja SKPD pada Bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid
8.4.6	4.01.01.1.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.803.000	29,00	29,00	0,00	63.960.000	28,58	62.031.082	27,72	0,86			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : 1 Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan konsultasi dan koordinasi : 1 Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyediaan rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dan luar daerah sampai dengan Bulan Maret Faktor Penghambat: Efisiensi perjalanan dinas, harga di bawah DPA Faktor Pendukung: 1. Koordinasi pegawai yang solid dan tanggungjawab pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 2. Koordinasi cukup intens. 3. Etos kerja yang baik dari seluruh pegawai untuk mendukung terselesainya laporan tepat waktu. 4. Pegawai menyelesaikan laporan tepat waktu
8.4.7	4.01.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00			Biro Tata Pemerintahan Setda DIY	1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : 2 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Pemeliharaan Website Tahun 2023 Biro Tata Pemerintahan Setda DIY : Website dari 1 Website	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:
8.5	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	7.985.000	25,00	25,00	0,00	500.000	6,26	500.000	6,26	0,00					
8.5.1	4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.985.000	25,00	25,00	0,00	500.000	6,26	500.000	6,26	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Laporan dari 1 Laporan 2. Laporan penyediaan jasa surat menyurat : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan materi pada SKPD 2. Mengkomodir kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan SKPD pada bulan Maret Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk memanfaatkan meterai sesuai dengan peruntukannya
8.6	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	160.364.700	27,49	27,49	0,00	40.467.200	25,23	34.176.600	21,31	3,92					
8.6.1	4.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.744.300	26,00	26,00	0,00	4.500.000	25,36	4.500.000	25,36	0,00			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya : 1 Unit dari 1 Unit 2. Kendaraan Dinas Jabatan Roda 4 : 1 Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan 2. Mengkomodir bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas jabatan pada Bulan Maret 3. Pemeliharaan service kendaraan dinas jabatan 4. Mengkomodir kebutuhan suku cadang kendaraan Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: 1. Koordinasi dan kerjasama antarpegawai yang solid 2. Antisipasi pegawai untuk merawat kendaraan
8.6.2	4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.538.100	26,50	26,50	0,00	26.649.600	25,25	20.489.000	19,41	5,84			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Subbagian Tata Usaha	1. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya : 6 Unit dari 11 Unit 2. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 : 4 Unit dari 4 Unit 3. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 : 2 Unit dari 7 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas operasional 2. Perawatan kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran aktivitas SKPD pada Bulan Maret 3. Mengkomodir bahan bakar minyak dalam bentuk voucher pada Bulan Maret Faktor Penghambat: Efisiensi pajak kendaraan yang dibayarkan di bawah harga DPA Faktor Pendukung: Kesadaran pegawai untuk memanfaatkan kendaraan dinas operasional sesuai peruntukannya
8.6.3	4.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.082.300	31,00	31,00	0,00	9.317.600	25,13	9.187.600	24,78	0,35			Bagian Bina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara : 3 Unit dari 3 Unit 2. Air Conditioner : 1 Jenis dari 1 Jenis	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: 1. Pemeliharaan Personal Computer (ganti hardisk, penambahan memori, update aplikasi, dan lain sebagainya)

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
														- Subbagian Tata Usaha	3. Peralatan Komputer : 1 Jenis dari 1 Jenis 4. LCD Proyektor : 1 Jenis dari 1 Jenis	3. Pemeliharaan laptop 4. Pemeliharaan Air Conditioner (si freon, pemindahan posisi AC, dan penurunan AC yang sudah rusak) Faktor Penghambat: 1. Tahun ini tidak dizinkan pengadaan peralatan, padahal AC perlu penggantian yang baru 2. Gangguan arus mengakibatkan AC kotor dan berbau Faktor Pendukung: 1. Keaktifan pegawai dalam melaporkan kerusakan sehingga dapat ditangani dengan cepat pula 2. Penanganan keluhan yang responsif
9	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	454.799.300	71,03	71,03	0,00	321.406.700	70,67	317.682.708	69,85	0,82					
9.1	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	189.099.900	50,41	50,41	0,00	93.964.200	49,69	91.614.700	48,45	1,24					
9.1.1	4.01.03.1.01.02	Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	147.100.000	61,80	61,80	0,00	89.649.300	60,94	87.420.000	59,43	1,51			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum : 2 Dokumen dari 3 Dokumen 2. Berkas usulan pemberhentian, pengangkatan anggota DPRD penggantian antar waktu : 2 usulan SK dan 3 usulan SK 3. Pengusulan dan Pelantikan Pejabat Kepala Daerah (Kabupaten Kuloprogo dan Kota Yogyakarta) : 0 dokumen dari 1 dokumen 4. Laporan hasil Sosialisasi Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 : 0 dokumen dari 1 dokumen	Tahapan pekerjaan (Fisik) yang sudah dilakukan: Berkas usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD : 1. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 71/KEP/2023 tentang Pemberhentian Antaranwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Sdr. Supripto R pada tanggal 6 Januari 2023. 2. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 13/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Antaranwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara Kals Ghoz Bahar pada tanggal 9 Januari 2023. 3. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 32/KEP/2023 tentang Peresmian Pemberhentian Antaranwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Saudara Sukardiyono, S.H pada tanggal 31 Januari 2023. 4. Telah disahkannya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 70/KEP/2023 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antaranwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama saudara Sefti Indradewi, S.Pd pada tanggal 1 Maret 2023. Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 : 1. Terlaksananya Rapat Persiapan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 2 Februari 2023 Pukul 09.30-selesai melalui daring. Acara ini dihadiri oleh KPU DIY, KPU Kota Yogyakarta, KPU Kabupaten Sleman, KPU Kabupaten Kulon Progo, KPU Bantul, KPU Gunungkidul, Bawaslu Kota Yogyakarta, Bawaslu Kabupaten Sleman, Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, Panewu Godasan, Panewu Lendah, Panewu Panggang, dan Panewu Sewon. Dalam hal ini membahas terkait pelaksanaan sosialisasi yang akan dilaksanakan 10 kali dengan rincian: 5 sosialisasi di Kota Yogyakarta dan 5 sosialisasi di Kabupaten. 2. Telah dilaksanakan rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten/Kota se-DIY pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.45-selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Kulon Progo, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Gunungkidul, Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Drs. Wahyu Krisnadi, M.M Analis Kebijakan Madya, dan Analis Kebijakan Muda Otonomi Daerah dan KSDN di Biro Tata Pemerintahan. 3. Telah dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Kamis, 9 Februari 2023 pukul 09.00-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Pada sosialisasi kali ini dihadiri oleh dua narasumber yaitu Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Bapak Tri Agus Iriharto, S.H, serta Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Yogyakarta Ibu Siti Nurhayati, S.S. Acara sosialisasi dihadiri oleh peserta dari segmen perempuan yang diwakili Ibu-ibu PKK se-Kemantren Condokusuman dan Danurejan. 4. Telah dilaksanakan Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat, 10 Februari 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan Setda DIY. Acara sosialisasi dihadiri oleh narasumber dari Ketua KPU Kota Yogyakarta Bapak Hidayat Widodo dan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Yogyakarta Bapak Noor Harysa Aryosomodro S.Sn., MAP, serta Kepala Bagian Pemerintahan Umum Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Ibu Agustina Pengestijah. Searan pada sosialisasi kali ini yaitu Tim Penggerak PKK Kemantren Katron, Mergasan, dan Mantrigeron sejumlah 40 orang. 5. Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu, 15 Februari 2023 pukul 09.30 -selesai di Kantor Kapanewon Panggang, Gunungkidul. Acara sosialisasi kali ini dihadiri narasumber dari anggota komisi A DPRD DIY Bapak Heri Dwi Haryono, S.H, Ketua Divisi Permas dan SDM KPU Kabupaten Gunungkidul Ibu Supmi, S.sos; Tri Asmianto Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul; Panewu Panggang Ibu Dra. Widayastuti, M.M; serta Ibu-ibu PKK se-kapanewon Panggang. 6. Terlaksananya Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa, 21 Februari 2023 pukul 09.00 -selesai di Kantor Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Acara ini dihadiri oleh narasumber kita Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Ibu Ibtih Muhiyah, SH, M, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Bapak Wasiman M.H, dan Anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Novida Kartika Hadri S.T, dengan dihadiri oleh seluruh PKK se-Kapanewon Lendah. 7. Telah terlaksananya Sosialisasi Tahapan pemilu Tahun 2024 pada Jumat 3 Maret 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja Lantai 3, Biro tata Pemerintahan Setda DIY. Acara ini dihadiri 40 peserta yang berasal dari TP-PKK se-Kemantren Tegalejo, Jetis, dan Gedongtengen, narasumber kali ini berasal dari Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto; Ketua KPU DIY Bapak Hamdan Kurniawan; dan Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY Bapak Drs. Mohammad Najib, M.Si. 8. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Selasa 7 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Godasan, Kabupaten Sleman. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari TP PKK se-kapanewon Godasan dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY Bapak Sudarto, S.H; Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU DIY Bapak Ahmad Shiddiq, S.Th.I., M.Hum; serta Ketua Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu DIY, Bapak Drs. Mohammad Najib, M.Si. 9. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada 9 Maret 2023 pukul 09.00-selesai di Kantor Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY bapak Heri Dwi Haryono, S.H.; Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia, KPU Kabupaten Sleman, bapak Aswino Wardhan; dan Ketua Divisi Sumberdaya Manusia dan Organisasi, Bawaslu Kabupaten Sleman Ibu Iri Herawati, S.P. Jumlah peserta dalam sosialisasi ini sebanyak 40 orang yang berasal dari TP PKK se Kapanewon Depok, Sleman. 10. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Rabu 15 April 2023 pukul 09.00-selesai di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul dengan narasumber anggota Komisi A DPRD DIY, KH. Purbodingrat, SE, MBA; Ketua KPU Kabupaten Bantul bapak Didik Joko Nugroho, S.Ant; Ketua Bawaslu DIY Ibu Sutrisnowati, SH, M.Psi; Penawir Kapanewon Sewon Ibu Hartini, S.I.P., M.M. Acara ini dihadiri oleh 40 peserta yang berasal dari TP PKK se Kapanewon Sewon Bantul 11. Telah terlaksana Sosialisasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 pada Jumat 17 April 2023 pukul 08.30-selesai di Ruang Rapat Dharma Praja, Gedung Kresna Lantai 3, Biro Tata Pemerintahan. Acara ini dihadiri oleh 40 orang peserta yang berasal dari TP PKK se Kemantren Limbuharjo dan Kotagede, untuk narasumber kali ini berasal dari Ketua Komisi A DPRD DIY Bapak Eko Suwanto S.Th.M.Si; Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi DIY Bapak Wawan Budiyanto, S.A., M.Si; Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Ibu Harlina, S.H

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan				Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)						
																Faktor Pendukung: 1. Komunikasi dan koordinasi yang lancar dengan OPD dan pihak terkait 2. Sarana dan Prasarana yang memadai
9.1.2	4.01.03.1.01.03	Facilitasi Penataan Wilayah	41.999.900	10,50	10,50	0,00	4.314.900	10,27	4.194.700	9,99	0,28			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Pemerintahan Umum	1. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 2. Laporan penyaluran pembangunan di wilayah perbatasan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: A. Tersusunnya jadwal rencana pelaksanaan kegiatan B. Terlaksananya rapat koordinasi internal dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan C. Terlaksananya rapat koordinasi finalisasi Rapergub Pengkoordinasian pembangunan wilayah perbatasan D. Terlaksananya rapat koordinasi terkait pembahasan penyusunan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan DIY tahun 2023 E. Tersusunnya surat permohonan personil Tim Pembangunan wilayah perbatasan DIY tahun 2023 Faktor Penghambat: Tidak ada hambatan yang berarti Faktor Pendukung: A. Kerjasama yang solid dan koordinasi yang baik antara personil
9.2	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	75.000.000	69,23	69,23	0,00	51.925.000	69,23	50.727.500	67,64	1,59					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penyusunan LPPD DIY Tahun 2022: 1. Penyusunan Tim Pelaporan LPPD Tahun 2022 2. Pengumpulan Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 3. Penyusunan LPPD Tahun 2022 4. Desk Verifikasi Data dan Dokumen Pendukung LPPD Tahun 2022 5. Revisi Penyusunan LPPD (Rancangan) Tahun 2022 Inspektoral 6. Tindak Lanjut Revisi LPPD 2022 7. Entri data dan dokumen pendukung dalam aplikasi SILPPD Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 1. Koordinasi dengan Tim Penerapan SPM DIY 2. Pengumpulan data Laporan Penerapan SPM DIY Tahun 2022 3. Entri data laporan SPM 4. Penyusunan Laporan SPM DIY Tahun 2022 5. Verifikasi data laporan penerapan SPM DIY Tahun 2022 6. Sinkronisasi data SPM 2022 dengan data LPPD 2022 Faktor Penghambat: LPPD: 1. Terdapat capaian-capaian yang belum optimal disebabkan IKK LPPD belum menjadi target kinerja OPD yang disupport dengan anggaran 2. Perbedaan persepsi terkait definisi IKK SPM: 1. Data yang dihasilkan pada Pendataan SPM berdasarkan Permendagri 59/2021 belum lengkap 2. SPM Perumahan Rakyat (Penyediaan RLH) belum didukung dengan penganggaran program/kegiatan untuk pemenuhannya 3. Target SPM PU oleh OPD berdasarkan kapasitas bukan berdasarkan jumlah penerima layanan Faktor Pendukung: LPPD: 1. Adanya komitmen dari pimpinan untuk Pelaporan Pemda DIY Tahun 2022 sinkron baik di LPPD, LKIP, LAKIP, LKJIP dan SPM 2. Pedoman penyusunan LPPD 2022 tidak mengalami perubahan yang signifikan 3. Penyamaan persepsi dengan Pemerintah Pusat dan pihak terkait (Inspektoral maupun OPD) terkait definisi IKK SPM: 1. Adanya pelaporan triwulan pada aplikasi eSPM 2. Pelaporan SPM Tahun 2022 telah menggunakan format sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021
9.2.1	4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	75.000.000	69,23	69,23	0,00	51.925.000	69,23	50.727.500	67,64	1,59					1. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan : 2 Laporan dari 2 Laporan
9.3	4.01.03.1.03	Facilitasi Kerja Sama Daerah	190.699.400	92,20	92,20	0,00	175.517.500	92,04	175.340.508	91,95	0,09					Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Terlaksananya Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Dalam Negeri : - Selasa 14-3-2023, Pembahasan usulan naskah kerja sama antara Pemda DIY dengan STPKat Santo Fransiskus Asisi Semarang - Selasa, 21-3-2023, Pembahasan naskah PKS antara DPRD DIY dengan DPK kab/kota tentang Jaga Library For All di DIY Faktor Penghambat: masih banyak instansi yang belum memahami hal apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam naskah kerja sama non investasi Faktor Pendukung: tim TKSD mau membantu memberi pemahaman kepada instansi yang belum begitu paham dalam penyusunan naskah kerja sama yang baik
9.3.1	4.01.03.1.03.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	190.699.400	92,20	92,20	0,00	175.517.500	92,04	175.340.508	91,95	0,09					1. Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi : 2 Dokumen dari 2 Dokumen
10	4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.193.542.350	14,67	14,67	0,00	261.932.800	8,20	245.070.565	7,67	0,53					
10.1	4.01.10.5.01	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan	2.874.183.550	16,30	16,30	0,00	261.932.800	9,11	245.070.565	8,53	0,58					
10.1.1	4.01.10.5.01.10	Pembinaan Penerapan Kesistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	2.874.183.550	16,30	16,30	0,00	261.932.800	9,11	245.070.565	8,53	0,58			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Rina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Dokumen Penerapan Kesistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina : 1 Dokumen dari 8 Dokumen 2. Laporan Hasil Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 3. Laporan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan : 0 Laporan dari 1 Laporan 4. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan : 1 Aplikasi dari 1 Aplikasi 5. Sosialisasi Kelembagaan Asli Daerah : 20 Kali dari 60 Kali 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kalurahan : 0 Aparatur dari 98 Aparatur 7. Sosialisasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Kalurahan : 0 Kali dari 4 Kali 8. Kajian Pedoman Pengembangan Kapasitas Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan : 0 Dokumen dari 1 Dokumen 9. Fasilitas, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan pada 292 Kalurahan (DZ Kalurahan sudah mengisi co reform space) : Laporan dari 1 Laporan	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Jumlah Dokumen Penerapan Kesistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang dibina 1) Pelaksanaan Penerapan Kelembagaan Kalurahan / Kelurahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren - Tersusunnya kerangka acuan kerja pelaksanaan koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan Kapanewon / Kemantren melalui koordinasi internal menetapkan bahan materi pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait. - Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan evaluasi penerapan kelembagaan Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan melalui koordinasi lapangan ke Kabupaten Bantul dengan lokasi Kalurahan Gungwarsi. Kemudian koordinasi dalam upaya penguatan peran pemerintah kalurahan dilakukan melalui forum rapat kerja penyelenggaraan pemerintahan kalurahan dengan sasaran pembahasan 8 area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kalurahan sebagai berikut: a. Tanggal 24 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area manajemen perubahan dan peraturan perundangan b. Tanggal 25 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area penguatan organisasi, tata laksana dan penguatan pengawasan c. Tanggal 26 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan SDM d. Tanggal 30 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Akuntabilitas e. Tanggal 31 Januari 2023 dengan sasaran pembahasan area perubahan Penguatan Pelayanan Publik Quick Wins dan Lembar Kerja Evaluasi -Penguatan terhadap kebijakan reformasi birokrasi kalurahan melalui Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sebanyak 4 kali melibatkan OPD Pemda Kabupaten, Paguyuban Lurah dan Pamong serta kapanewon dengan rundown: a. Tanggal 21 Februari di Kabupaten Bantul b. Tanggal 22 Februari di Kabupaten Gunungkidul c. Tanggal 23 Februari di Kabupaten Kulon Progo d. Tanggal 27 Februari di Kabupaten Sleman - Koordinasi bersama Akademisi untuk menelaah draft pergub Reformasi Birokrasi Kalurahan pada tanggal 15 Maret untuk menetapkan juknis RBK. 2) Sosialisasi Kelembagaan Asli DIY - Koordinasi penguatan materi dan penyusunan kerangka acuan kerja rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi kelembagaan asli DIY dengan hasil pelaksanaan di bulan Februari sebanyak 10 kali melibatkan aparat pemerintah kalurahan di Kabupaten Sleman -Terlaksananya sosialisasi kelembagaan asli Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan Lurah/Pamong Kalurahan, Badan Permasyarakatan Kalurahan serta Ketua Duku, dengan rundown sebagai berikut: a. Tanggal 21-24 Februari dengan lokasi peserta dari Kalurahan se-Kabupaten Sleman b. Tanggal 27 Februari dengan lokasi peserta dari Kabupaten Bantul c. Tanggal 8,9,15,16 dan 17 Maret dengan lokasi peserta dan Kabupaten Gunungkidul Faktor Penghambat: 1. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY sebagai kegiatan usulan legislatif terdapat tiga kali pelaksanaan tanpa kehadiran narasumber dari DPRD DIY, sehingga adanya pengembalian - Februari honorarium narasumber @11.000.000 x 3

No	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Fisik			Keuangan					Testimoni Penerima Manfaat	Bukti Testimoni	Lokasi	Sub Unit Organisasi SKPD	Keluaran	Keterangan Progres Bulan
				Target	Realisasi	Deviasi	Target (RP)	Target (%)	Realisasi (RP)	Realisasi (%)	Deviasi						
																	- Maret honorarium Narasumber @1.000.000 x 4 2. Efisiensi Zoom, sebesar 1.449.949 Faktor Pendukung: 1. Input dari OPD yang hadir terhadap masing-masing area perubahan pada penerapan reformasi birokrasi kalurahan memberikan penguatan pada indikator RBKd. 2. Dalam pelaksanaan sosialisasi kelembagaan asli DIY, adanya komitmen peserta undangan untuk hadir mengikuti dan berperan aktif. Di Bulan Maret peserta dari Kalurahan di Gunungkidul berpartisipasi aktif dan konsisten sesuai penuntukan undangan sampai dengan pelaksanaan hari terakhir.
10.2	4.01.10.5.07	Sarana dan Prasarana Keistimewaan	319.358.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00						
10.2.1	4.01.10.5.07.01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	319.358.800	0,00	0,00	0,00	0	0,00		0,00	0,00			BIRO TATA PEMERINTAHAN - Bagian Sina Pemerintahan Kalurahan/Kelurahan dan Kapanewon/Kemantren	1. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewaan yang Disediakan : Unit dari 14 Unit. 2. Rehab Ruang Kerja Paguyuban Lurah DIY : Paket dari 1 Paket 3. Air Conditioner : Unit dari 6 Unit 4. Printer : Unit dari 2 Unit 5. Televisi : Unit dari 1 Unit 6. Personal Komputer : Unit dari 2 Unit 7. Laptop : Unit dari 1 Unit 8. LCD Proyektor : Unit dari 1 Unit	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Faktor Penghambat: Faktor Pendukung:	
Jumlah			5.406.383.650	21,55	21,55		941.658.000	17,42		897.975.945	16,61						